

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Paser bahwa permasalahan strategis yang dipandang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pembangunan antara lain meliputi : permasalahan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, permasalahan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan tatakelola pemerintahan, serta permasalahan ekonomi. Tantangan utama yang harus dijawab oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser kedepan dalam rangka mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan investasi dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelestarian keaneka ragaman hayati dari setiap pemanfaatan ruang untuk pembangunan. Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industry kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitaraan dan pengembangan potensi local serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan lapangan kerja. Urusan penanaman modal ditetapkan dalam rencana program dan kegiatan serta pendanaan sebagai berikut :

A. Program

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
5. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
9. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

C. Sub Kegiatan

1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
3. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
4. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
8. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
9. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
10. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
11. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
13. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
16. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
17. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
21. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
22. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
23. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
24. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
27. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
28. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

D. Pendanaan Indikatif

Penetapan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran pencapaian kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan.

Keberhasilan capaian kinerja ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program urusan penanaman modal yang mencakup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode renstra dapat dicapai.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program atau kegiatan (outcome) dan atas suatu program dapat ditetapkan beberapa indikator.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 beserta target capaian kinerja setiap tahun disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Mewujudkan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah				Persentase Pertumbuhan Investasi	n/a	30 %		35 %		40 %		45 %		50 %		32,61 %		
	Meningkatnya Realisasi Investasi			Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) dalam ribu	657.970	690.869		2.000.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		3.937.45		
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) dalam ribu	657.970	690.869	195.919.800	2.000.000	250.919.800	2.500.000	250.919.800	3.000.000	250.919.800	3.500.000	250.919.800	3.937.450	1.199.599.00	
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha	n/a	2	195.919.800	2	250.919.800	2	250.919.800	2	250.919.800	2	250.919.800	10	1.199.599.00	
			- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	n/a	1	97.959.900	1	125.459.900	1	125.459.900	1	125.459.900	1	125.459.900	5	599.799.500	
			- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)	n/a	1	97.959.900	1	125.459.900	1	125.459.900	1	125.459.900	1	125.459.900	5	599.799.500	
			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor non tambang dan non sawit	56	59	236.800.000	62	243.800.000	65	245.300.000	71	247.300.000	78	249.300.000	335	1.222.500.00	
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	6	3	236.800.000	3	243.800.000	3	245.300.000	3	247.300.000	3	249.300.000	15	1.222.500.00	
			- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	n/a	1	98.800.000	1	103.800.000	1	103.800.000	1	103.800.000	1	103.800.000	5	514.000.000	
			- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	2	138.000.000	2	140.000.000	2	141.500.000	2	143.500.000	2	145.500.000	10	708.500.000	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah investor yang diawasi dan dilakukan pembinaan	56	60	435.600.000	62	440.200.000	65	440.200.000	71	440.200.000	78	440.200.000	336	2.196.400.00	

			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian terhadap perusahaan (Perusahaan)	56	60	435.600.000	62	440.200.000	65	440.200.000	71	440.200.000	78	440.200.000	336	2.196.400.000	
			- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha.)	20	20	97.600.000	22	102.200.000	25	102.200.000	31	102.200.000	38	102.200.000	136	506.400.000	
			- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)	20	20	169.000.000	20	169.000.000	20	169.000.000	20	169.000.000	20	169.000.000	100	845.000.000	DAK (Non Fiskal)
			- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (Kegiatan Usaha)	20	20	169.000.000	20	169.000.000	20	169.000.000	20	169.000.000	20	169.000.000	100	845.000.000	DAK (Non Fiskal)
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	50%	60%	692.000.000	70%	781.800.000	80%	781.800.000	90%	781.800.000	100%	781.800.000	100%	3.819.200.000	
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	50%	60%	692.000.000	70%	781.800.000	80%	781.800.000	90%	781.800.000	100%	781.800.000	100%	3.819.200.000	
			- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	1	156.400.000	1	171.400.000	1	171.400.000	1	171.400.000	1	171.400.000	5	842.000.000	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan			Indeks Kepuasan Masyarakat	80,53 %	81,02 %		81,04 %		81,06 %		81,07 %		81,12 %		81,12 %		
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,02	535.600.000	81,04	610.400.000	81,06	610.400.000	81,07	610.400.000	81,12	610.400.000	81,12	2.977.200.000	
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Unsur Standar Pelayanan Yang Terpenuhi	80	81,02%	535.600.000	81,04%	610.400.000	81,06%	610.400.000	81,07%	610.400.000	81,12%	610.400.000	82,10%	2.977.200.000	
			- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	900	920	438.000.000	922	508.200.000	926	508.200.000	928	508.200.000	930	508.200.000	4626	2.470.800.000	
			- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Orang)	20	20	97.600.000	20	102.200.000	20	102.200.000	20	102.200.000	20	102.200.000	100	506.400.000	

Rencana Strategis | 2021-2026

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja	75	75		75,2		75,5		75,8		80		80	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	75	75	7.036.793.314	75,2	7.388.632.980	75,5	7.758.064.625	75,8	8.145.967.864	80	8.553.266.251	80	38.882.725.031
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Sasaran Strategis DPMPTSP	100	100	230.222.230	100	184.652.537	100	192.385.164	100	200.504.422	100	209.029.649	100	1.016.793.996
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	102.505.000	3	107.630.250	3	113.011.763	3	118.662.351	3	124.595.468	15	566.404.831
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	1	1	74.783.130	1	77.022.287	1	79.373.401	1	81.842.071	1	84.434.175	5	397.455.064
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	52.934.100	1	53.580.805	1	54.259.845	1	54.972.838	1	55.721.479	5	271.469.060
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50%	100%	6.392.287.664	100%	6.709.902.047	100%	7.034.397.149	100%	7.393.567.007	100%	7.761.245.357	100%	35.291.399.224
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan (Orang/Bulan)	30	30	5.917.739.240	30	6.213.626.202	30	6.524.307.512	30	6.850.522.888	30	7.193.049.032	150	32.699.244.874
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	474.548.424	1	496.275.845	1	510.089.637	1	543.044.119	1	568.196.325	5	2.592.154.350
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	50%	100%	85.051.200	100%	89.303.760	100%	93.768.948	100%	98.457.395	100%	103.380.265	100%	469.961.569
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang)	320	400	85.051.200	400	89.303.760	400	93.768.948	400	98.457.395	400	103.380.265	2000	469.961.569
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	50%	100%	247.497.220	100%	318.952.886	100%	347.400.530	100%	358.820.557	100%	380.261.584	100%	1.652.932.777
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan(Paket)	1	1	6.731.700	1	7.068.285	1	7.421.699	1	7.792.784	1	8.182.423	5	37.196.892
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	22.189.000	1	82.379.255	1	98.998.217	1	97.998.129	1	106.398.035	5	407.962.636
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	41.103.100	1	43.158.255	1	45.316.168	1	47.581.976	1	49.961.075	5	227.120.574

Rencana Strategis | 2021-2026

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	30.141.800	1	31.648.890	1	33.231.335	1	34.892.901	12	36.637.546	6	166.552.477
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	3.694.020	2	3.878.721	2	4.072.657	2	4.276.290	2	4.490.104	2	20.411.792
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	2	2	143.637.600	2	150.819.480	2	158.360.454	2	166.278.477	2	174.592.401	10	793.688.411
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasiperkantoran	50%	100%	17.000.000	100%	17.850.000	100%	18.742.500	100%	19.679.625	100%	20.663.607	100%	93.935.732
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	1	1	15.000.000	1	15.750.000	1	16.537.500	1	17.364.375	1	18.232.594	5	82.884.465
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	50%	100%	64.735.000	100%	67.971.750	100%	71.370.338	100%	74.938.854	100%	78.685.797	100%	357.701.735
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	1	1	3.000.000	1	3.150.000	1	3.307.500	1	3.472.875	1	3.646.519	5	16.576.894
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	1	1	45.950.000	1	48.247.500	1	50.659.875	1	53.192.869	1	55.852.512	5	253.902.756
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	17	17	15.785.000	17	16.574.250	17	17.402.963	17	18.273.111	17	19.186.766	85	87.222.085